

Collaborative Governance dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bintan

Qori Hidayasa¹, Fitri Kurnianingsih², Agus Hendrayady³

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: qorihidayasa648@gmail.com

Kata kunci

Collaborative Governance, Stunting, Isu Prioritas

Abstrak

Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan berupaya menurunkan angka stunting. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, angka stunting di Kabupaten Bintan telah mengalami penurunan yang awalnya mencapai 5,23% pada tahun 2021 turun menjadi 3,41% pada tahun 2022. Masih ditemukan permasalahan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bintan yaitu terdapat beberapa daerah dengan angka stunting yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Collaborative Governance dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bintan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini (1) Dialog Tatap Muka telah dilakukan para pemangku kepentingan; (2) Membangun Kepercayaan telah terbangun dengan sendirinya dan melalui rapat koordinasi; (3) Komitmen Pada Proses telah terbentuk dan seragam; (4) Pemahaman Bersama, visi, misi dan tujuan telah disepakati namun masih ada perbedaan persepsi mengenai tupoksi tugas; (5) Hasil Bersama, secara keseluruhan telah terwujud namun masih ada beberapa daerah dengan angka stunting yang tinggi.

Keywords

Collaborative Governance, Stunting, Priority Issues

Abstract

The Regional Government of Bintan Regency is trying to reduce the stunting rate. Based on data from the Health Service, the stunting rate in Bintan Regency has decreased, which initially reached 5.23% in 2021, dropping to 3.41% in 2022. There are still problems in accelerating stunting reduction in Bintan Regency, there are several areas with high stunting rates. This study aims to determine the Collaborative Governance process in accelerating stunting reduction in Bintan Regency. Using a qualitative approach to the type of descriptive research. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results of this study (1) Face to face dialogue have been carried out by the stakeholders; (2) Building Trust has been built by itself and through coordination meetings; (3) Process Commitment has been formed and uniform; (4) Shared understanding, vision, mission and goals have been agreed upon, but there are still differences in perceptions regarding the duties and responsibilities; (5) Joint Results, as a whole have been realized, but there are still several areas with high stunting rates.

Pendahuluan

Pada tahun 2020 prevalensi *stunting* di Indonesia telah mencapai 26,92%, sedangkan pada tahun 2021 prevalensi *stunting* di Indonesia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni menjadi 24,4%. Adapun pada tahun 2022 prevalensi *stunting* kembali mengalami penurunan yakni menjadi 21,6% (<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id>). Meskipun prevalensi *stunting* dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan, namun persentase tersebut masih dinilai tinggi mengingat angka tersebut masih jauh dari ambang batas yang telah ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) yakni tidak boleh melebihi dari 20%.

Penurunan prevalensi *stunting* saat ini menjadi agenda utama Pemerintah Indonesia. Keseriusan pemerintah untuk menurunkan angka *stunting* dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Adapun dalam Peraturan Presiden tersebut tercantum target penurunan *stunting* sebesar 14% secara nasional yang harus dicapai pada tahun 2024. Percepatan penurunan *stunting* dilakukan secara multisektor oleh seluruh elemen Pemerintah Indonesia dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah termasuk pemerintah daerah Kabupaten Bintan.

Bintan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Merujuk pada data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, pada tahun 2021 jumlah balita *stunting* mencapai 569 kasus dengan prevalensi 5,23%, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 383 kasus dengan prevalensi 3,41%. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa angka *stunting* mengalami penurunan, namun masih terdapat beberapa desa/kelurahan yang mengalami peningkatan kasus *stunting*. Di Kecamatan Seri Kuala Lobam tepatnya di Desa Teluk Sasah, kasus *stunting* cukup tinggi karena sebagian besar orangtua bekerja sehingga anaknya dititipkan kepada orang lain (batampos.co.id, 2023).

Secara keseluruhan angka *stunting* di Kabupaten Bintan memang menunjukkan *trend* penurunan, namun persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Pasalnya terdapat banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari persoalan *stunting*. Anak merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang nantinya berpotensi sebagai tolak ukur kesuksesan suatu daerah. Jika persoalan ini tidak dituntaskan, maka akan berakibat pada terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang berkualitas bagi pembangunan suatu daerah. Oleh sebab itu, percepatan penurunan *stunting* harus menjadi agenda prioritas bagi daerah khususnya bagi Kabupaten Bintan.

Pemerintah Kabupaten Bintan mulai gencar melakukan berbagai upaya guna percepatan penurunan *stunting*. Sesuai arahan dari Bupati Bintan bahwa angka *stunting* harus dapat menurun lagi sehingga menjadikan Bintan dapat bebas dari *stunting* (*zero stunting*) ([batamnews](http://batamnews.com), 2022). Oleh sebab itu, Kabupaten Bintan terus berupaya untuk menekan angka *stunting* serta mencegah munculnya kasus-kasus *stunting* baru. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bekerjasama untuk mendukung terwujudnya percepatan penurunan *stunting* melalui Tim

Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS). Adapun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam TPPS melakukan kolaborasi bersama organisasi kemasyarakatan yakni TP-PKK Kabupaten Bintan dan salah satu pihak swasta yakni PT Bintan Inti Industrial Estate (BIIE)

Penelitian ini menganalisis tentang tata kelola kolaboratif dalam percepatan penurunan *stunting* khususnya di Kabupaten Bintan. Pada dasarnya, upaya dalam percepatan penurunan *stunting* tidak akan mungkin diselesaikan oleh pemerintah sendiri saja. Pemerintah daerah membutuhkan pihak-pihak lainnya untuk ikut serta dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam hal ini, maka pemerintah diharuskan untuk menerapkan model pemerintahan kolaboratif melalui tata kelola kolaboratif (*Collaborative Governance*).

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Dalam rangka untuk mengetahui proses pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Bintan tahun 2022, peneliti menggunakan teori dari Ansell and Gash (2007) mengenai proses *Collaborative Governance* yang terdiri dari: (1) Dialog tatap muka; (2) Membangun kepercayaan; (3) Komitmen pada proses; (4) Pemahaman bersama, dan (5) Hasil sementara.

1. Dialog Tatap Muka

Pada tahap dialog tatap muka, para pemangku yang terlibat telah melaksanakan dialog tatap muka. Pemerintah daerah Kabupaten Bintan telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten pada awal tahun 2022 sebagai upaya untuk mewujudkan percepatan penurunan *stunting*. Dialog tatap muka dalam percepatan penurunan *stunting* dilakukan melalui rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Bapelitbang. Pertemuan tersebut dilakukan beberapa kali dalam satu bulan atau menyesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam rapat koordinasi tersebut membahas berbagai hal penting terkait penanganan *stunting* seperti evaluasi kinerja para OPD, kendala-kendala dan permasalahan yang ditemukan dilapangan, rencana tindak lanjut, serta perkembangan dari 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten.

Pemerintah daerah Kabupaten Bintan juga turut melakukan kolaborasi bersama PT Bintan Inti Industrial Estate (BIIE). Kolaborasi tersebut diawali dengan pertemuan tatap muka yang dilakukan kurang lebih lima kali. Adapun bentuk kolaborasi yang terjalin antara pemerintah dengan PT BIIE yakni penyediaan bantuan logistik berupa 20 (dua puluh) buah paket makanan bagi

anak yang terindikasi *stunting* di Desa Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam serta bantuan penyediaan sewa ruko bagi Rumah Asuh Bintang Kasih untuk anak yang terindikasi *stunting* selama enam bulan lengkap dengan sarana prasarana berupa lemari loker. Adapun rumah asuh tersebut terletak di Kecamatan Seri Kuala Lobam.

Terdapat juga pertemuan rutin tingkat kecamatan yang dilakukan melalui Lokakarya Mini (Lokmin) dengan fasilitatornya yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB). Lokmin ini diadakan sebulan sekali dan dihadiri oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat desa/kelurahan dan kecamatan dalam rangka untuk membahas mengenai evaluasi lintas sektor terkait rencana tindak lanjut, kendala, serta permasalahan yang ditemukan di lapangan dalam upaya percepatan penurunan *stunting*.

Selain itu, dialog tatap muka juga dilakukan oleh para teknis yakni perpanjangan tangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) dan Dinas Kesehatan yakni Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan kader-kader posyandu melalui sosialisasi, edukasi, penyuluhan dan kunjungan secara langsung (*sweeping*) bagi para sasaran resiko *stunting* terutama anak yang menderita *stunting*. Hal ini dilakukan agar mempercepat penurunan angka *stunting* dengan langsung memberikan penyuluhan dan edukasi pada sasaran resiko *stunting* dalam hal ini adalah masyarakat.

2. Membangun Kepercayaan

Pada tahap memabangun kepercayaan antar para pemangku kepentingan telah terbangun dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan persoalan *stunting* yang merupakan isu nasional serta merupakan amanat dari pusat sampai dengan daerah, maka kolaborasi dalam percepatan penurunan *stunting* dilakukan dari tingkat pusat dan diturunkan sampai dengan tingkat provinsi, kab/kota sampai dengan tingkat terkecil yakni desa/kelurahan. Dalam hal ini, para pemangku kepentingan tingkat kabupaten hanya tinggal menyesuaikan dan mengikuti arahan kolaborasi dari kementerian-kementerian pusat.

Membangun kepercayaan dalam percepatan penurunan *stunting* juga dilakukan secara formal dan informal. Secara formal, komunikasi dilakukan saat rapat koordinasi berlangsung. Adapun rapat koordinasi terkait percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Bintang berjalan dengan baik dan disiplin karena selalu dipimpin dan dikoordinir oleh Bupati, Sekretaris Daerah, ataupun Bapelitbang. Kemudian, secara informal komunikasi antar sesama pemangku kepentingan juga dilakukan melalui media *online* untuk memudahkan koordinasi dalam penanganan *stunting*. Adapun komunikasi secara informal dilakukan menggunakan media online seperti *zoom* ataupun melalui *whatsapp group*.

Membangun kepercayaan juga turut dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pihak PT Bintan Inti Industrial Estate (BIIE) melalui rapat pertemuan. Pada awal rapat pertemuan disampaikan maksud dan tujuan kolaborasi serta pembagian tupoksi tugas. Dalam hal ini PT BIIE melihat kesungguhan dari ketua TP,PKK yang secara khusus mendatangi PT BIIE untuk mengajak bekerjasama dalam upaya penanganan *stunting* khususnya di Kecamatan Seri Kuala Lobam. Perlu diketahui bahwa Kecamatan Seri Kuala Lobam memiliki angka *stunting* yang cukup tinggi yakni mencapai 31 kasus. Oleh sebab itu dilakukanlah kerjasama antara pemerintah daerah bersama pihak swasta yakni PT BIIE dalam rangka untuk menekan angka *stunting*.

Membangun kepercayaan juga dilakukan oleh para pemangku kepentingan kepada masyarakat melalui edukasi dan penyuluhan. Adapun bentuk edukasi dan penyuluhan tersebut disampaikan melalui media elektronik dan cetak seperti spanduk-spanduk, *Instagram*, serta melalui Radio RRI Tanjungpinang. Selain itu, membangun kepercayaan dengan masyarakat juga dilakukan oleh para teknis yakni Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan kader-kader posyandu melalui kunjungan dan penyuluhan yang dilakukan secara langsung baik itu di posyandu ataupun dengan kunjungan secara langsung pada sasaran beresiko *stunting* (*sweeping*).

Pada tahap membangun kepercayaan ini, para pemangku kepentingan telah mewujudkan sikap saling percaya. Akan tetapi, bentuk saling percaya dari masyarakat belum terwujud dibuktikan dengan masih ditemukannya kendala berupa penolakan dari masyarakat. Masih ditemukan adanya masyarakat yang menolak bahwa anaknya ataupun keluarganya memiliki indikasi *stunting*. Dengan adanya penolakan dari masyarakat memberi arti bahwa rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah daerah maupun petugas teknis dilapangan belum terbentuk.

3. Komitmen Pada Proses

Pada tahap komitmen pada proses, para pemangku kepentingan yang terlibat dalam percepatan penurunan *stunting* telah memiliki komitmen yang kuat dan seragam. Adapun komitmen tersebut yakni menurunkan dan mengatasi persoalan *stunting* di Kabupaten Bintan. Hal ini dapat dilihat dari adanya penandatanganan komitmen percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Bintan tahun 2022 yang dilakukan oleh seluruh jajaran yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tidak terkecuali Bupati sampai dengan perangkat desa/kelurahan. Para pemangku kepentingan juga telah memahami dan melaksanakan tugas serta fungsi mereka masing-masing sesuai dengan *jobdesk* yang telah diberikan dan disepakati diawal.

Selain itu, komitmen pada proses yang kuat juga turut datang dari pihak swasta yakni PT BIIE. Hal ini dapat dilihat dari adanya keseriusan PT BIIE untuk ikut berkolaborasi menjadi Bapak Asuh bagi anak-anak *stunting*

khususnya di Kecamatan Seri Kuala Lobam tepatnya di Desa Teluk Sasah pada tahun 2022. Peran PT BIIE sebagai Bapak Asuh melalui bantuan penyediaan 20 (dua puluh) buah paket makanan sehat dan *support* penyediaan dana bagi penyewaaan ruko untuk Rumah Asuh Bintang Kasih bagi anak-anak yang terindikasi *stunting* selama enam bulan terhitung dari bulan Juni 2023. PT BIIE juga turut menyediakan sarana dan prasarana yakni lemari loker bagi Rumah Asuh tersebut.

4. Pemahaman Bersama

Pada indikator pemahaman bersama, para pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Bintan telah dilakukan melalui rapat koordinasi meskipun terkadang masih terdapat perbedaan persepsi terkait tupoksi tugas, namun hal tersebut diselesaikan dan diluruskan kembali pada saat rapat koordinasi berlangsung.

Selain itu, pada awal rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) telah dilakukan penyatuan persepsi dan penjelasan terkait tupoksi kinerja masing-masing pemangku kepentingan. Kemudian, juga dilakukan kesepakatan terkait visi, misi dan tujuan yakni melakukan penurunan angka prevalensi *stunting* yang sudah ada sehingga tidak ada lagi penambahan kasus *stunting* baru bahkan mewujudkan Kabupaten Bintan yang bebas *stunting*.

Dapat diartikan bahwa pemahaman bersama dalam percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Bintan ini sudah terwujud dilihat dari adanya kesepakatan terkait pembagian tugas, visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, adanya penyelesaian masalah yang dilakukan melalui rapat koordinasi apabila terdapat perbedaan persepsi terkait tupoksi tugas dari para pemangku kepentingan.

Terwujudnya pemahaman bersama ini tidak terlepas dari peran dialog tatap muka yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan. Dialog tatap muka yang berjalan dengan baik dapat mengatasi kesalahpahaman yang bisa berujung pada perbedaan persepsi. Pemahaman bersama dalam percepatan penurunan *stunting* ini akan memudahkan para pemangku kepentingan untuk merencanakan rencana tindak lanjut kedepannya.

5. Hasil Sementara

Pada tahap ini, hasil sementara dalam kolaborasi percepatan penurunan *stunting* yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan secara keseluruhan sudah terwujud. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penurunan prevalensi *stunting* berdasarkan data e-PPGBM yang awalnya mencapai 569 kasus dengan prevalensi 5,23% pada tahun 2021 turun menjadi 383 kasus dengan prevalensi 3,41% pada tahun 2022. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya peran para Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPSS) yang telah dibentuk sejak awal tahun 2022 serta kerjasama dengan TP.PKK dan PT BIIE.

Dengan adanya hasil sementara yang telah dicapai bukan berarti kegiatan terkait proses kolaborasi telah berakhir. Terutama masih ada beberapa desa yang memiliki angka prevalensi *stunting* yang tergolong tinggi.

Hasil kolaborasi antara pemerintah dan PT BIIE belum dapat dilihat karena kolaborasi terkait pendirian rumah asuh bagi anak terindikasi *stunting* baru berjalan pada bulan Juni 2023. Hasil kolaborasi akan bisa dilihat pada akhir tahun tepatnya saat rapat evaluasi.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bintan sudah terwujud. Hal ini dapat dilihat dari kelima indikator dalam penelitian yakni dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama dan hasil sementara yang telah menunjukkan bahwa telah dilakukannya proses kolaborasi antara pemerintah daerah yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) bersama TP.PKK dan PT BIIE. Hasil akhir dari kolaborasi ini menunjukkan *trend* penurunan dari kasus *stunting* yang awalnya mencapai 569 kasus pada tahun 2021 turun menjadi 383 pada tahun 2022. Hanya saja perlu ditekankan upaya dalam membangun kepercayaan bersama masyarakat serta pemahaman dari para pemangku kepentingan dalam memahami tupoksi tugas masing-masing.

Referensi

- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Imani, N. (2020). *Stunting Pada Anak Kenali dan Cegah Sejak Dini*. Jakarta: Hihaz Pustaka Mandiri.
- Islamy, L. O. S. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Khasanah, U., Esyuananik, Widyawati, M. N., & Laili, A. N. (2022). *Buku Saku Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan Keluarga*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Bildung.
- Rahayu, A., Yulidasari, F., Putri, A. O., & Anggraini, L. (2018). *Study Guide - Stunting dan Upaya Pencegahannya*. Yogyakarta: CV Mine.
- Sabaruddin, A. (2015). *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudrajat, D. (2022). *Kolaboratif Visioner: Kepemimpinan Ideal Era Generasi Milenial*. Bandung: Alqa.
- Trihono, Atmarita, Tjandrarini, D. H., Irawati, A., Utami, N. H., Tejayanti, T., & Nurlinawati, I. (2015). *Pendek (Stunting) di Indonesia, Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Lembaga Penerbit Balitbangkes.
- Waliah, S., Mustanir, A., Wismayanti, Y. F., Ramdani, A., S, M., Uang, Y., Kanah, I., Samin, R., Tauhid, Mouw, E., Jabbar, A., Lekatompessy, R. L., & Razak, M. R. R. (2022). *Collaborative Governance (Dalam Perspektif Administrasi Publik)* (A.

- Hendrayady (ed.)). Bandung: Media Sains Indonesia.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18, 543–571.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Fitrauni, R., Muchlis, N., & Arman. (2019). Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Gorontalo. *Journal Of Muslim Community Health (JMCH)*, 3(1), 193–209.
- Latifa, S. N. (2018). Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 13(2), 173–179.
- Norsanti, N. (2021). Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar). *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(1), 10–21.
- Priyono. (2020). Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Good Governance*, 16(2), 150–174.